

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini istilah globalisasi ekonomi telah menjadi topik hangat yang mencerminkan dunia usaha yang semakin kompetitif, tidak terkecuali di Indonesia. Siap tidak siap, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus memasuki era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, satu era yang persaingannya sangat ketat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya saat ini juga menghadapi tantangan kompetensi global. Sejalan dengan itu BUMN juga memiliki tanggung jawab yang semakin besar untuk menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia.

Pengaruh globalisasi juga memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan agar tujuan dari bisnis tersebut tercapai sehingga bisnisnya tetap dapat bertahan (*going concern*). Dalam perekonomian modern, manajemen dan pemilik perusahaan semakin nyata dipisahkan untuk kepentingan pengendalian. Pemisahan ini dapat menimbulkan adanya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tetap antara kepentingan-kepentingan yang ada misalnya antara pemegang saham dengan manajemen. Pengendalian tersebut dilakukan oleh para pimpinan untuk memperoleh keyakinan mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah organisasi atau entitas bisnis, manajemen perlu melakukan pengambilan keputusan strategik untuk membawa organisasi tersebut mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang baik akan memberikan kesuksesan dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pengendalian internal akan membantu manajemen dalam menyediakan jaminan kelayakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, awalnya banyak kalangan menganggap implementasi pengendalian internal hanya akan menambah cost perusahaan dan tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kemajuan perusahaan. Namun dewasa ini banyak perusahaan yang sudah menyadari pentingnya pengendalian internal dalam mewujudkan tujuan perusahaan.

Adanya perubahan sikap dari perusahaan-perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal tak lepas dari adanya risiko-risiko yang muncul akan berpotensi menghalangi perusahaan dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan risiko, pengendalian internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam manajemen risiko. Ketika terdapat risiko-risiko dalam mencapai tujuan perusahaan, yang berarti kegagalan merupakan kemungkinan yang sangat kuat, pengendalian internal harus diletakan pada tempat yang mampu menunjukan risiko-risiko tersebut. Selain itu juga pengendalian internal yang buruk akan mengarahkan perusahaan kepada kerugian, skandal, kegagalan, dan merusak reputasi perusahaan dalam sektor apapun perusahaan tersebut beroperasi.

Pengendalian internal merupakan instrumen yang mampu meminimalisir risiko-risiko perusahaan yang sangat mungkin membawa perusahaan ke arah operasional yang tidak efektif dan tidak efisien. Hal tersebut yang menjadi alasan perusahaan-perusahaan menilai pengendalian internal sangat penting. Didalam sistem pengendalian internal perusahaan melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Pengendalian Internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2013:159)

Terdapat fenomena mengenai lemahnya pengendalian internal di dalam BUMN seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepada 21 BUMN terkait dengan operasional perusahaan milik negara. Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2015 menyatakan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan pada umumnya BUMN telah merancang dan menyusun Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara memadai, namun penerapannya belum optimal. Hal itu terkait dengan upaya mengamankan kekayaan perusahaan, mengelola pendapatan, biaya dan investasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan – kelemahan yang terjadi dalam operasional BUMN, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap perundang – undangan. Permasalah terdiri dari berbagai macam yakni SOP yang belum disusun, pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP yang tak ditaati dan lain-lain. Sejumlah masalah adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (belum memiliki kebijakan strategis untuk perluasan pangsa pasar dan SOP penutupan rute penerbangan).

Di antaranya adalah PT Semen Padang (belum memiliki SOP tentang penyusunan HPS dalam proses pengadaan), PT Kimia Farma Tbk (belum memiliki kebijakan baku dalam penghapusan piutang ragu-ragu), PT Angkasa Pura II (belum memiliki prosedur sebagai data pembanding manifest jumlah penumpang final yang menjadi subjek pelayanan jasa pesawat udara, sehingga pendapatan hanya didasarkan manifest final yang disahkan pejabat perusahaan penerbangan).

Serta penemuan pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. Di antaranya adalah PT Bukit Asam Tbk (belum menerapkan Perdirjen Minerba terkait penyesuaian jarak angkut atas penjualan batu bara ke PLN pada 2013-2014 yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan), Perum Perhutani (kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan karena tak dapat memenuhi target produksi air minum dalam kemasan sesuai dengan pihak ketiga), dan PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (proses pengambilan agunan yang diambil alih tak sesuai dengan ketentuan misalnya tak didukung dokumen legal yang memadai).

Masalah lainnya adalah penyimpangan peraturan di bidang tertentu. Hal itu di antaranya adalah PT Timah Tbk (belum menyusun dokumen Amdal untuk wilayah tambang DU 956 di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau walaupun sudah memiliki IUP), PT Pelindo II (melakukan perjanjian pengelolaan terminal peti kemas dengan PT JICT yang belum memiliki izin usaha sebagai badan usaha pelabuhan), PT Hotel Indonesia Natour (perusahaan belum melunasi pajak pembangunan beserta sanksinya atas unit Inna Simpang Surabaya dan Head Quarter Bali).

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan operasional BUMN pada 21 BUMN mengungkapkan 264 temuan yang memuat 348 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 164 kelemahan SPI dan 184 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun. (Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com>, 2016).

Kasus lainnya yang menimpa BUMN yaitu yang terjadi pada PT Berdikari (Persero) merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam sektor peternakan dan pangan. Pada pertengahan 2017, 5 orang tersangka ditahan atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Barat, tahun Anggaran 2010 – 2011 dan 2012 – 2013. PT Berdikari ini terlibat dalam perkara korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan pupuk menurut temuan selama proses restrukturisasi internal audit, serta terdapat kasus lebih besar lainnya berdasarkan restrukturisasi internal audit tersebut hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Berdikari, Eko Taufik Wibowo.

Masalah lain yang membelit PT Berdikari yaitu, pada 2010 perseroan dikaitkan dengan tindakan wanprestasi anak usahanya, Berdikari Insurance yang mengalami gagal bayar klaim pertanggung jawaban atas nasabah PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) yang merupakan anak usaha dari PT Pupuk Kaltim. Pada April 2016, CV Kurnia Mekar Raharja melayangkan somasi kepada Direksi PT Berdikari atas tindakan tidak memenuhi pembayaran pasokan konsentrat yang terhutang sejak 2015. Nilai total tunggakan tercatat sebesar Rp 2,1 miliar. PT Berdikari masih belum mampu menyelesaikan tunggakannya kepada CV Kurnia Mekar Raharja dan rekan Kerja PT Berdikari lainnya.

Sengkarut yang terjadi pada internal PT Berdikari berdampak pada kinerja anak usaha maupun induk usaha karena pengendalian internal perusahaan tidak berjalan dengan efektif dan efisien serta banyak kecolongan dalam pengawasan sehingga masih banyak masalah dalam internal perusahaan. Sementara itu, kondisi keuangan induk usaha PT Berdikari hingga tahun 2016 sangat menyedihkan. Kinerja penjualan merosot tajam dari semula Rp 450 miliar pada 2015, menjadi Rp 229 miliar pada 2016. PT Berdikari memang memiliki banyak lini usaha, selain peternakan dan pangan, juga menjadi penyedia barang dan jasa perdagangan umum, serta jasa logistik, hingga furniture. (Sumber: <https://tirto.id>, 2017).

Fenomena lain yang terjadi pada BUMN adalah dilakukan pemeriksaan pengelolaan investasi pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Dari hasil pemeriksaan ini bahwa pengelolaan investasi PT KAI beserta anak perusahaan telah mematuhi perundangan-undangan dan ketentuan yang terkait. Namun Hasil

Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017, masih ditemukan banyak permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan maupun kelemahan sistem pengendalian internal. Ini ditemukan selama hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi PT KAI dan anak perusahaan tahun buku 2014 sampai triwulan I 2016.

Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyatakan secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi pada PT KAI dan anak perusahaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 19 permasalahan senilai Rp 15,91 miliar. permasalahan tersebut, meliputi 7 kelemahan sistem pengendalian intern, 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2 permasalahan ketidakhematan.

Namun, selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan penyetoran ke kas perusahaan senilai Rp 6,60 miliar," Berdasarkan IHPS tersebut, beberapa permasalahan PT KAI antara lain terkait rencana penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) belum disusun secara cermat dan belum ada koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Akibatnya, penyertaan modal negara (PMN) Rp 2 triliun pada PT KAI untuk jalur KA Trans Sumatera menjadi idle karena tidak dimanfaatkan.

Selanjutnya, PT KAI tidak optimal dalam melakukan koordinasi dengan Pemkot Tangerang dalam perencanaan pembangunan jalur kereta api bandara Soekarno-Hatta. Sehingga terjadi pemborosan senilai Rp 2,88 miliar atas hasil

studi kelayakan pembangunan jalur KA bandara melalui pusat Kota Tangerang yang tidak digunakan. Ini lantaran penolakan perizinan dari Pemkot Tangerang.

Kemudian, PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) yang ditunjuk langsung sebagai kontraktor utama, mengalihkan seluruh pekerjaan kepada subkontraktor tanpa melalui prosedur pemilihan, dan subkontraktor menargetkan keuntungan yang melebihi kewajaran. Ini menyebabkan kelebihan pembayaran senilai Rp 6,47 miliar.

Terakhir, pejabat pengadaan barang dan jasa belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Serta masih ada kelemahan dalam proses pengadaan, penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Hal ini menyebabkan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa mengakibatkan PT KAI dan anak perusahaan tidak dapat memperoleh harga pekerjaan yang paling menguntungkan perusahaan.

PT KAI juga disebut akan mengakomodasi peraturan tentang jasa konstruksi di dalam keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Tangerang dalam penetapan trase pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, PT KAPM telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke PT KALOG senilai Rp 6,6 miliar. (Sumber: <https://nasional.kontan.co>, 2017).

Fenomena - fenomena diatas menunjukkan bahwa pengendalian internal masih belum dilaksanakan secara optimal sehingga berimbas terganggunya kegiatan operasional perusahaan. Serta tidak dilaksanakannya sistem

pengendalian dengan baik mengakibatkan kurang efektifnya sistem pengendalian tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahui kualitas pengendalian internal, perlu dilakukannya evaluasi. Biasanya evaluasi ini dilakukan oleh auditor internal dalam perusahaan. Fungsi internal audit bertugas untuk memonitor, memantau dan menilai efektivitas pengendalian internal sehingga akan mengurangi risiko-risiko atau ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan.

Menurut Dwi Ranti (2013) bahwa perkembangan fungsi internal audit sebagai konsultan intern membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghalangi tercapainya tujuan perusahaan, melalui evaluasi risk management dan internal control structure. Selain itu membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan serta penggunaan sumber daya, termasuk mencegah penyimpangan (fraud) atau kesalahan serta ketidakpatuhan (compliance).

Permasalahan – permasalahan diatas terjadi dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan pada BUMN. Terkait pengendalian dan pengawasan tentu dalam hal ini Badan Pengawas BUMN sebagai auditor internal harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal yang dilakukan seorang badan pengawas, diantaranya independensi, kompetensi, dan ruang lingkup pekerjaan pengawas internal.

Mengenai kinerja seorang badan pengawas internal dalam kaitannya dengan sistem pengendalian internal yang diterapkan dipengaruhi oleh faktor

internal dan eksternal yang sejalan dengan teori atribusi. Pada teori atribusi terdapat faktor internal yakni kemampuan yang dimana dalam penelitian ini dapat dijabarkan faktor internal dalam sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan kemampuan meliputi independensi dan kompetensi. Sedangkan faktor eksternal yakni lingkungan yang dimana dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam pengendalian internal yang berkaitan dengan lingkungan kerja adalah ruang lingkup pekerjaan pengawas internal.

Internal auditor dikatakan independen apabila dapat secara bebas melakukan pekerjaan pemeriksaannya. Dengan independensi, internal auditor dapat pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa dan tidak memihak sehingga pelaksanaan pekerjaannya menjadi layak. Internal auditor harus independen terhadap aktivitas bagian-bagian yang diperiksanya pada perusahaan.

Pengawas intern memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan intern. Proses pengawasan akan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan objektif dengan integritas yang tinggi oleh pengawas sehingga dalam mengungkapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada akan lebih maksimal. Objektivitas berhubungan dengan sikap netral dan tidak memihak, sedangkan integritas yang tinggi berhubungan dengan kejujuran. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya, namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk

memiliki kepercayaan terhadap independensi auditor (Elder, dkk. 2011) dalam jurnal *Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Ruang Lingkup Pekerjaan Pengawas Internal terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern BUM Desa Se-Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng*.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dhesy, dkk (2017) menunjukkan variabel independen berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern. Semakin independen seorang pengawas maka efektivitas pengendalian intern semakin efektif, ini berarti perubahan independensi searah dengan perubahan efektivitas pengendalian intern.

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan dan keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi digunakan mendeskripsikan kemampuan profesional yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil (Rahayu dan Suhayati, 2009).

Kompetensi dan Independensi merupakan standar yang harus dimiliki oleh seorang auditor baik auditor eksternal maupun auditor internal perusahaan, untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun tidak ada jaminan bahwa auditor yang memiliki kedua hal tersebut akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Goleman (2011) dalam jurnal

Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Auditor Internal terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Internal Pada Kalla Group, bahwa hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor untuk berprestasi, berkomitmen terhadap organisasi serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Pekerjaan auditor internal dapat berjalan baik dengan kompetensi yang dimiliki oleh pengawas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Agus, dkk (2017) menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam pelaksanaan pengendalian internal, dimana ruang lingkup dan luasnya perusahaan sebagai suatu kesatuan organisasi akan mempengaruhi dan menjadikannya lebih kompleks. Karena semakin besar suatu organisasi semakin luas pula rentang kendali yang dipikul oleh pimpinan. Hal ini mengakibatkan pimpinan tidak mungkin lagi secara langsung mengawasi jalannya operasi perusahaan secara keseluruhan, maka pimpinan melimpahkan kewenangannya pada bawahan dengan catatan tanggungjawab terakhir tetap berada di pimpinan. Untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan bawahan tentang perusahaan adalah benar, maka pimpinan perusahaan membutuhkan adanya audit internal sebagai pengawas di dalam perusahaan. Pengendalian internal perusahaan didesain sebaik mungkin supaya aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan pekerjaan audit pengawas harus melaksanakan aktivitas-aktivitas audit yang meliputi: merencanakan audit, memeriksa dan mengevaluasi informasi, mengkomunikasikan hasil, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh BUMN dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Ruang lingkup pekerjaan pengawas internal dapat diukur dengan empat indikator yaitu (1) memiliki keandalan informasi, (2) memiliki ketaatan pada peraturan, kebijaksanaan, dan prosedur, (3) menilai efisiensi dan ekonomis pada penggunaan sumber daya yang ada, dan (4) pencapaian tujuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bayu dan Rasmini (2014) menunjukkan bahwa variabel ruang lingkup audit pengawas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Agus, dkk (2017) dengan judul Pagaruh Independensi, Kompetensi, dan Ruang Lingkup Pekerjaan Pengawas Internal terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern BUM Desa Se-Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa independensi, kompetensi dan ruang lingkup berpengaruh signifikan terhadap pengendalian intern. Walaupun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada waktu dan lokasi penelitian, dimensi penelitian, serta alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian. Pertimbangan – pertimbangan inilah yang mendorong peneliti untuk memfokuskan seberapa besar pengaruh

independensi, kompetensi dan ruang lingkup terhadap pengendalian intern. Penelitian ini menggunakan objek pada tiga BUMN di Bandung.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN PENGAWAS INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN (Survey Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT POS Indonesia (Persero), dan PT PLN (Persero) di Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Independensi Auditor Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
2. Bagaiman Kompetensi Auditor Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
3. Bagaimana Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
4. Bagaiman Efektivitas Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung

5. Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor Internal terhadap Efektifitas Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektifitas Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
7. Seberapa besar pengaruh Ruang Lingkup Pekerjaan Auditor Internal terhadap Efektifitas Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Independensi Auditor Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
2. Untuk mengetahui Kompetensi Auditor Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
3. Untuk mengetahui Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
4. Untuk mengetahui Efektivitas Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi Auditor Internal terhadap Efektifitas Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektifitas Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ruang Lingkup Pekerjaan Auditor Internal terhadap Efektifitas Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan bukti empiris mengenai Independensi, Kompetensi, dan ruang Lingkup Pekerjaan Pengawas Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern.
- b. Memberikan kontribusi bagi auditor internal untuk memperhatikan Independensi, Kompetensi, dan ruang Lingkup Pekerjaan Pengawas Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern.

- c. Memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, akuntansi pada umumnya, audit internal pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai pengaruh Independensi, Kompetensi, dan ruang Lingkup Pekerjaan Pengawas Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang cukup berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan serta mengembangkan praktik – praktik yang dianggap telah memadai.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan acuan riset untuk mengembangkan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap tema ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan Pengumpulan data dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan PT PLN di Kota Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.